



LAKIP

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH

**INSPEKTORAT
KABUPATEN SORONG**

2023

Kata Pengantar

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Kabupaten Sorong mempunyai kewajiban untuk melaporkan kinerjanya sepanjang tahun anggaran kepada bidang pengawasan dan atas realisasi anggaran Inspektorat Kabupaten Sorong serta kepada Pimpinan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mendasarkan pada kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Kabupaten Sorong menyusun LAKIP Tahun 2023 dengan menyajikan pengungkapan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan yang dijumpai untuk perbaikan di masa yang akan datang.



Amas, Januari 2024
Inspektur Kabupaten Sorong

[Handwritten Signature]
Dr. Ari Wijayanti, SE. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700505 199603 2 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Struktur Organisasi	6
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Dasar Hukum	11
1.5 Sistematika Penyusunan	12
BAB II	15
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	15
2.1 Tujuan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026	15
2.2 Tujuan dan Sasaran OPD	16
2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	17
2.4 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran	18
2.5 Penetapan/Perjanjian Kinerja	19
BAB III	21
AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1 Pengukuran Kinerja	21
3.2 Analisis Kinerja	24
BAB IV	38
PENUTUP	38
4.1 Kesimpulan	38
4.2 Saran	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ataurakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Bertitik tolak dari RENSTRA Inspektorat Tahun 2023-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Inspektorat Tahun 2023 dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah penyusunan LAKIP Tahun 2023 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan

pembandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LAKIP Inspektorat menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah Inspektorat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Inspektorat. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023 yaitu tahun pertama RENSTRA Inspektorat Tahun 2023.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023 diharapkan dapat :

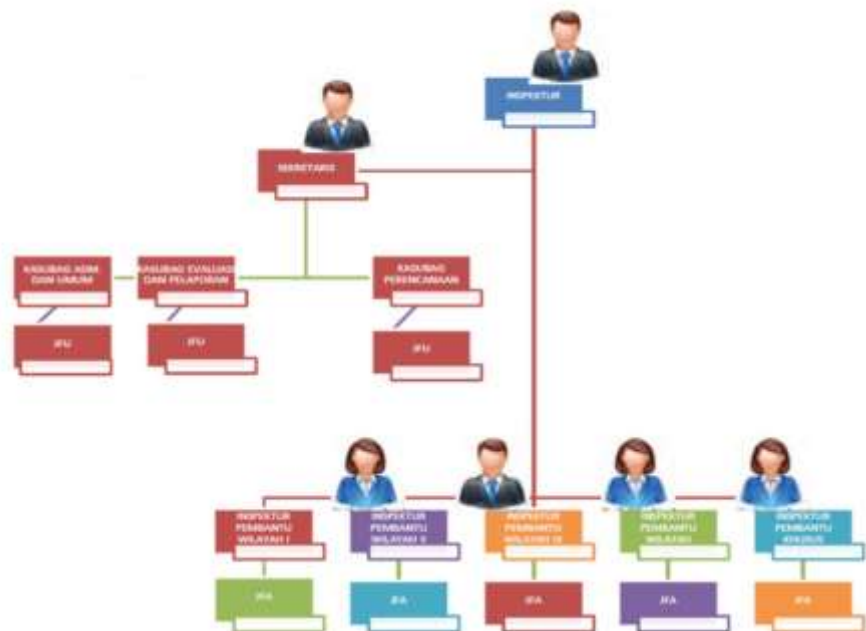
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sorong.
2. Mendorong Inspektorat Kabupaten Sorong didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kabupaten Sorong untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Inspektorat Kabupaten Sorong di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sorong menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong dan Peraturan Bupati Sorong Nomor 26 Tahun 2017 dan perubahan Peraturan Bupati Sorong Nomor 12 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat kabupaten sorong, sebagai berikut :

- 1) Inspektur
- 2) Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan
 - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 - c) Sub Bagian Administrasi dan Umum
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah II
- 5) Inspektur Pembantu Wilayah III
- 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV
- 7) Inspektur Pembantu Khusus
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
 - a) Jabatan Fungsional Auditor (JFA) :
 - Auditor Madya,
 - Auditor Muda dan
 - Auditor Pertama
 - b) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah (P2UPD) :
 - Pengawas Madya,
 - Pengawas Muda dan
 - Pengawas Pertama.
 - c) Jabatan Fungsional Umum (JFU) :
 - Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
 - Pengelola Monitoring Dan Evaluasi
 - Pengevaluasi Program Dan Kinerja
 - Pengelola Evaluasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
 - Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan
 - Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran
 - Pengadministrasi Perencanaan Dan Program
 - Pramuka Bakti
 - Pengadministrasi Perkantoran
 - Pengelola Kepegawaian
 - Analisis Data Dan Informasi
 - Bendahara

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KAB. SORONG.



Bagan 1.2 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektorat Kabupaten Sorong mempunyai fungsi :

1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan arah dan Tugas Pribantuan oleh Perangkat Daerah
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksana tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi.

Berdasarkan analisa jabatan kebutuhan pegawai Inspektorat idealnya adalah 59 orang, jumlah pegawai yang ada sebanyak 39 orang sehingga masih ada kekurangan pegawai sebanyak 20 orang atau 33,90%.

Jumlah personil yang ada per 31 Desember 2023 sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) yang terdiri dari 9 orang ASN Jabatan Struktural, 9 orang tenaga JFT, dan 20 orang ASN JFA/ PUPD.

Tabel 1.1 Pegawai Berdasarkan Jabatan Pangkat dan Golongan Tahun 2023

Jabatan	Golongan/Ruang	Jumlah	
Inspektur	Pembina Utama	1	orang
Sekretaris	Pembina TK I/Gol IV b	1	orang
Inspektur Pembantu Wilayah 1	Pembina/Gol IV a	1	orang
Inspektur Pembantu Wilayah 2	Pembina/Gol IV a	1	orang
Inspektur Pembantu Wilayah 3	Pembina/Gol IV a	1	orang
Inspektur Pembantu Wilayah 4	Pembina Tk. I/Gol IV b	1	orang
Inspektur Khusus	Pembina Tk. I/Gol IV b	1	orang
Kepala Sub Bagian Perencanaan	Penata Tk. I /Gol. III d	1	orang
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Penata Tk. I/Gol. III d	1	orang
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	-	-	orang
Jabatan Fungsional Auditor			
Auditor Madya	Pembina /Gol. IV a	3	orang
Auditor Muda	Penata TK I/Gol. III d	1	orang
	Penata /Gol. III c	8	orang
Auditor Pertama	Penata Muda TK I/Gol. III b	2	orang
Jabatan Fungsional PPUPD			
Pengawas Madya Pemerintahan	Pembina /Gol IV a	1	orang
Pengawas Muda Pemerintahan	Penata Tk.1/Gol. III d	3	orang
Pengawas Pertama Pemerintahan	Penata Muda Tk.1/Gol. III b	2	orang
	Penata Muda/Gol. III a	2	orang
Fungsional Umum	Penata TK I/Gol. III d	1	orang
	Penata Muda TK I/Gol. III b	3	orang
	Penata Muda /Gol. III a	1	orang
	Pengatur/ Gol. II c	3	orang
		38	orang

Jabatan	Golongan/Ruang	Jumlah	
Tenaga P3K		6	orang

Tabel 1.2 Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1	S3	: 1 orang
2	S2	: 4 orang
3	S1	: 29 orang
4	D3	: - orang
5	SMA/SMK	: 4 orang

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai dibanding beban kerja/bezeting Tahun 2023

No.	Jabatann	Formasi	Bezeting	%
1	Struktural	10	9	23.68%
2	Auditor	24	14	36.84%
3	P2UPD	10	6	15.79%
4	Fungsional Umum	15	9	23.68%
	Jumlah	59	38	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Inspektorat belum memenuhi jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban kerja.

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Kelamin Tahun 2023

No	Jabatan	Perempuan	Laki-laki
1	Struktural	7	2
2	Auditor	12	8
3	Fungsional Umum	4	5
	Jumlah	23	15

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, Desember 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu

instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah. Lakip disusun agar yaitu sebagai;

1. Bahan evaluasi kinerja.
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.
3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang,
4. Penyempurnaan berbagai kebij akan yang diperlukan.

Tujuan

Memperhatikan maksud di atas, maka diuraikan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan LAKIP ini adalah sebagai berikut ;

1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Organisasi Perangkat Daerah.
3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah.
4. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah secara dan berkesinambungan.
5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya.

Mendorong Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

- Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Bupati Sorong Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sorong Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sorong Nomor 55 Tahun 2017.
 7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Sorong TA. 2023.

1.5 Sistematika Penyusunan

Sistematika / Instrumen yang digunakan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Inspektorat, terdiri dari komponen yang merupakan satu kesatuan berupa:

- 1) Bab I - Pendahuluan;
Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusunan LKJIP dan sistem penyajian LKJIP.

2) Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja;

Menjelaskan muatan Renstra Inspektorat 2023 – 2026 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran, indikator dan target Rencana Pembangunan Daerah (RPD) selama masa transisi RENSTRA, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2023.

3) Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4) Bab III - Penutup.

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tahun 2023, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

5) Lampiran

Berisi tabel uraian kegiatan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Tujuan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026

Tujuan RPD merupakan terjemahan visi dan misi daerah dalam RPJPD Kabupaten Sorong Tahun 2005-2025 kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing OPD Tahun 2023-2026.

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan masing-masing diuraikan sebagaimana dijelaskan dibawah ini :

1. Tujuan : Meningkatkan Mutu SDM Masyarakat Kabupaten Sorong.
Sasaran :
 - 1.1 Terciptanya masyarakat yang cerdas, sehat dan berdaya saing;
 - 1.2 Meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - 1.3 Meningkatkan stabilitas wilayah dan Ketahanan masyarakat Kabupaten Sorong;

2. Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.
Sasaran :
 - 2.1 Meningkatnya perekonomian masyarakat;
 - 2.2 Meningkatnya pembangunan dan ketahanan pangan;

3. Tujuan : Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur.
Sasaran :
 - 3.1 Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pembangunan Infrastruktur Dasar

4. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Sasaran :
 - 4.1 Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pembangunan rendah karbon

5. Tujuan : Terwujudnya pembangunan dan pelayanan publik berkelas dunia

Sasaran :

5.1 Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing

2.2 Tujuan dan Sasaran OPD

2.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari tujuan sasaran RPD yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai dengan 4 (empat) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Inspektorat serta didasarkan pada isu-isu strategik dalam RENSTRA Inspektorat Tahun 2023-2026 ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Inspektorat ada 2, yaitu:

1. Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas.
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik.

2.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat. dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai Inspektorat ada 2 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Penilaian Kualitas Reformasi Birokrasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pengawasan.

2. Meningkatnya kualitas layanan publik bidang pengawasan

Dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Sorong dan Inspektorat

Tujuan : Terwujudnya pembangunan dan pelayanan publik berkelas dunia		
Sasaran : Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing		
Tujuan	Sasaran	Indikator
1. Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas	1.1 Meningkatnya Penilaian Kualitas Reformasi Birokrasi Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pengawasan	1.1.1 Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong
		1.1.2 Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal dan Internal
		1.1.3 Presentase penanganan kasus pengaduan
		1.1.4 Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sorong
		1.1.5 Survei Penilaian Integritas (SPI)
2. Meningkatnya kualitas layanan publik	2.1 Meningkatnya kualitas layanan publik bidang pengawasan	2.1.1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
		2.1.2 Nilai AKIP

2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPD akan dicapai dengan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut berupa

Kebijakan dan Program. Upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra tersebut bukan merupakan suatu hal yang mutlak (rigid) tetapi berfungsi sebagai acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya untuk memaksimalkan usaha - usaha pencapaian tujuan dan sasaran satuan kerja. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPD didasari asumsi - asumsi kondisi makro dan kondisi regional pada saat penyusunannya serta prediksi selama lima tahun kedepan. Karena itu seiring dengan tuntutan perubahan dan dinamika pembangunan yang ada ditengah masyarakat maka tidak tertutup kemungkinan dilaksanakannya berbagai upaya lain dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk perbaikan kebijakan, pengembangan program, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak maupun anjuran semen kelembagaan.

Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat didalam Dokumen RPD selengkapnya dituangkan dalam formulir lampiran RENSTRA.

2.4 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Rencana Kinerja merupakan hasil dari proses pengintegrasian antara perencanaan stratejik dengan penganggaran. Proses ini dilaksanakan setiap awal tahun anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, ketersediaan dana/anggaran serta hasil capaian kinerja yang lalu berdasarkan koridor yang telah digariskan dalam Dokumen Renstra. Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Inspektorat, sehingga melalui proses ini diharapkan seluruh target pencapaian sasaran dan tujuan dapat dilaksanakan sesuai agenda pembangunan yang telah disusun. Rencana Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Perencanaan kinerja masing - masing urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat dalam tahun 2023 selengkapnya dituangkan dalam formulir rencana kinerja.

2.5 Penetapan/Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

Dokumen penetapan kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran yang dimulai dari musrenbang, penyusunan RKPD, penyusunan KUA-PPAS sampai dengan APBD disahkan melalui PERDA, dokumen RKT tersebut menjadi rencana kinerja yang definitive menjadi Penetapan Kinerja.

Dokumen penetapan kinerja tersebut di dibuat setelah APBD disetujui dan disahkan oleh DPRD. Ditingkat OPD dokumen penetapan kinerja di buat oleh Kepala OPD, yang berisi janji dari Kepala OPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD), ditingkat KABUPATEN dokumen penetapan kinerja dibuat oleh Bupati untuk disampaikan kepada Presiden melalui menPAN dan Reformasi Birokrasi.

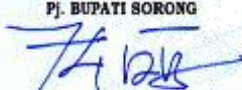
Sasaran-sasaran dalam perjanjian kinerja tahun 2023 sebagaimana yang dituangkan dokumen penetapan kinerja adalah sebanyak 2 sasaran strategik. 3 Program, 10 Kegiatan, 31 Sub kegiatan yang dibiayai dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.12.849.519.650,00 dan Realisasi sebesar Rp.11.335.411.386,00 atau 88,22%.


Perjanjian kinerja masing - masing urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Inspektorat dalam tahun 2023 selengkapnya dituangkan dalam formulir penetapan kinerja. Gambar 2.1 sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023
INSPEKTUR**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Rumus Perhitungan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas	1. Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong	Level	3	Penilaian Level Maturitas SPIP Kabupaten Sorong oleh Tim Penilai Eksternal (BPKP-Perwakilan dan Tim Assessment Pusat)
		2. Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal dan Internal	Persen	75	$\frac{\text{Jumlah TLHP yg ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Temuan Material}} \times 100\%$
		3. Persentase penanganan kasus pengaduan	Persen	30	$\frac{\text{Jumlah Laporan yg ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Laporan Pengaduan}} \times 100\%$
		4. Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sorong	Level	3	Penilaian Level Maturitas SPIP Kabupaten Sorong oleh eksternal (BPKP-Perwakilan dan Tim Assessment Pusat)
		5. Nilai AKIP	Nilai	61,00	Penilaian nilai AKIP oleh Tim penilai SAKIP berdasarkan PermenPAN-RB nomo 88 tahun 2021 tentang Evaluasi
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan	1. Nilai Survey Kepuasan	Nilai	65,00	Nilai Penilaian Mandiri SKM

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan/Sumber dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.5,144,848,775.00	APBD- DAU/DBH
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.2,960,073,000.00	APBD- DBH
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp. 2,278,400,800.00	APBD- DBH
		<u>Rp. 10,383,322,575.00</u>	

Pihak Kedua,
Pj. BUPATI SORONG

YAN PIET MOSO, S.Sos. MM.

Aimas, 03 Januari 2022
Pihak Pertama,
INSPEKTUR

Dr. ARI WIJAYANTI, SE. MM.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19700505 199603 2 003

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, maka seluruh aktivitas organisasi tersebut dapat diukur, dan pengukurannya tidak semata-mata hanya kepada masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) tetapi lebih ditekankan kepada tercapainya sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien serta hasil program dapat dimanfaatkan.

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan akuntabilitas.

Untuk mengukur kinerja terutama keberhasilan pencapaian masing-masing indikator kinerja hasil (outcome) pada sasaran digunakan pengukuran kinerja melalui skala pengukuran ordinal, dengan kriteria penilaian sebagai berikut, tabel 3.1 sebagai berikut :

INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
≥ 100	Sangat memuaskan
$85 \leq 100$	Sangat Baik
$70 \leq 85$	Baik
$55 \leq 70$	Sedang
≤ 55	Kurang Baik

Tabel 3.2 Rencana Kerja dan Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2023
melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana 2023	Realisasi 2023 s/d Triwulan I	Realisasi 2023 s/d Triwulan II	Realisasi 2023 s/d Triwulan III	Realisasi 2023 s/d Triwulan IV	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Eva SAKIP, LPPD	10	3	5	1	1	10	100.00%
2	Pengawasan Desa	Eva Dana Desa/ Kelurahan	20	2	6	8	4	20	100.00%
3	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Lap Keuangan OPD/ Pemda	20	2	4	10	8	24	120.00%
4	Reviu Laporan Kinerja	Audit Kinerja/ Reviu	10	1	2	4	3	10	100.00%
5	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Audit Keuangan OPD	10	2	3	2	2	9	90.00%
6	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Probity Audit	20	5	6	5	3	19	95.00%
		Pemeriksaan Khusus Ringan	4	1	1	1		3	75.00%
		Pemeriksaan Khusus Berat	4	1	2	2		5	125.00%
		Audit PBJ/ Monev	140	5	15	35	106	161	115.00%
7	Kerjasama Pengawasan Internal	SABER-PUNGLI	1		1			1	100.00%
		Survei Penilaian Integritas (SPI - KPK)	1			1		1	100.00%
8	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tindak lanjut hasil pemeriksaan Eksternal/ Internal APIP	6	1	1	2	2	6	100.00%
9	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	TP-TGR daerah	2					0	0.00%
10	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	E-LKHPN, E-LKHASN	1		1			1	100.00%
		Zona Integritas	1					0	0.00%

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana 2023	Realisasi 2023 s/d Triwulan I	Realisasi 2023 s/d Triwulan II	Realisasi 2023 s/d Triwulan III	Realisasi 2023 s/d Triwulan IV	Realisasi 2023	Capaian (%)
11	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Monitoring Centre of Prevention (MCP- KPK)	1				1	1	100.00%
12	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Evaluasi Reformasi Birokrasi	1			1		1	100.00%
		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1					0	0.00%
13	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan OPD	6	1		1		2	33.33%
		Urusan PEMDA	6	1	1	1		3	50.00%
14	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Digitalisasi Dokumen	1				1	1	100.00%
		Media Informasi Publik	1				1	1	100.00%
		Tim Penilai JFA	1				1	1	100.00%
		Tim Penilai PUPD	1				1	1	100.00%
15	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Diklat Substantif	70		12	34	10	56	80.00%
		Diklat Non Substantif	8			5		5	62.50%
		Diklat Penjenjangan	6		2		1	3	50.00%
		Ujian Penjenjangan	6		2		1	3	50.00%

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Analisis Kinerja

Tujuan 1 :

Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas

Sasaran 1 :

Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Pengawasan

Sasaran tersebut diukur dengan 1 indikator kinerja utama 1.1 yang dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Awal RPD	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.1	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong	3 Skor/Level	3 Skor/Level	3 Skor/Level	3 Skor/Level	2 Skor/Level (2.65)	100%	67%

Tahun 2023 Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di kabupaten sorong berada pada level 2 dibanding tahun sebelumnya yaitu level 3 pada tahun 2022. Hal ini tidak sesuai target dan selaras dengan raihan Opini Laporan Keuangan oleh BPK-RI yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sejak tahun 2014.

Turunnya hasil penilaian Maturitas SPIP diakibatkan oleh adanya Operasi Tangkap Tangan oleh KPK-RI terhadap PJ. Bupati Sorong dan beberapa ASN Pemerintah Kabupaten Sorong.



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
 Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, 13120
 Telepon 021-85910031 (hunting) Faksimile 021-85910302

Nomor : PE.09.03/S-822/D3/04/2023 28 Desember 2023
 Lampiran : Dua Berkas
 Hal : Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023

Yth. Seluruh Kepala Perwakilan BPKP di tempat

Memperhatikan surat kami nomor: DL.04/S-613/D3/04/2023 tanggal 22 September 2023 hal Percepatan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023 dan surat nomor: PE.09.03/S-782/D3/04/2023 tanggal 29 November 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP di Lingkungan K/L/D Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023, sebagai berikut:

Hasil Evaluasi Penilaian SPIPT dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023

Uraian	Populasi	Hasil Evaluasi											
		NA	%	Level 1	%	Level 2	%	Level 3	%	Level 4	%	Level 5	%
Provinsi													
1) SPIP	38	4	10,53%	0	0,00%	4	10,53%	30	78,95%	0	0,00%	0	0,00%
2) MRI	38	4	10,53%	0	0,00%	14	36,84%	20	52,63%	0	0,00%	0	0,00%
3) EPK	38	4	10,53%	2	5,26%	19	50,00%	13	34,21%	0	0,00%	0	0,00%
4) APIP	38	1	2,63%	2	5,26%	3	7,89%	32	84,21%	0	0,00%	0	0,00%
Kab/Kota													
1) SPIP	508	12	2,36%	25	4,92%	140	27,56%	331	65,16%	0	0,00%	0	0,00%
2) MRI	508	12	2,36%	37	7,28%	341	67,13%	118	23,23%	0	0,00%	0	0,00%
3) EPK	508	12	2,36%	68	13,39%	395	77,76%	33	6,50%	0	0,00%	0	0,00%
4) APIP	508	0	0,00%	27	5,31%	118	23,23%	363	71,46%	0	0,00%	0	0,00%

sumber: diolah dari data hasil evaluasi BPKP

Untuk selanjutnya agar Kepala Perwakilan dapat menerbitkan laporan Hasil Evaluasi untuk masing-masing pemerintah daerah. Rincian skor dan level masing-masing pemerintah daerah tersaji dalam lampiran 1 dan 2.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Deputi Kepala BPKP,
Dianandatangani secara elektronik oleh

Raden Suhartono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama BPKP
2. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
3. Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polihukum PMK
4. Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara
5. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan B2-6



No	Uraian	Populasi	NA	%	Level 1	%	Level 2	%	Level 3	%	Level 4	%	Level 5	%
27	Papua Barat													
447	PW27	1	Kabupaten Sorong			2.678	2	2.540	2	1.950	1	3.000	3	
448	PW27	2	Kota Sorong			2.793	2	2.490	2	2.600	2	3.000	3	
449	PW27	3	Kabupaten Teluk Bintuni			2.425	2	2.060	2	1.910	1	1.390	1	

Gambar 3.1 Laporan Hasil Penilaian Maturitas SPIP se-Indonesia

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran adalah :

1. Adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK-RI dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.
2. Ketidapatuhan Pejabat Tinggi Pemerintah Kabupaten Sorong terhadap Komitmen dan Integritas memberantas tindak pidana Korupsi.

Hambatan/masalah :

1. Belum seluruh ASN memahami Integritas dan Komitmen pemberantasan Korupsi.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

1. Penerapan Manajemen Risiko, implementasi dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko berjenjang diseluruh Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong.
2. Penerapan Budaya Kerja anti Korupsi, Berintegritas dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).
3. Melaksanakan pendampingan kepada OPD untuk menyusun risk Register, Rencana tindak pengendalian dan implemntasi Manajemen Risiko,
4. Pemberian Reward bagi OPD dan ASN teladan.

Indikator kinerja utama 1.2 yang dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut:

No	Indikator	Kondisi Awal RPD	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.2	Persentase Temuan Material BPK yang dapat di Tindak Lanjuti (%)	78 %	75 %	80%	83,78%	82,96 %	111,71%	103,70%

Dengan penjelasan pengukuran sebagai berikut:

1. Persentase Temuan Material BPK yang dapat di Tindak Lanjuti

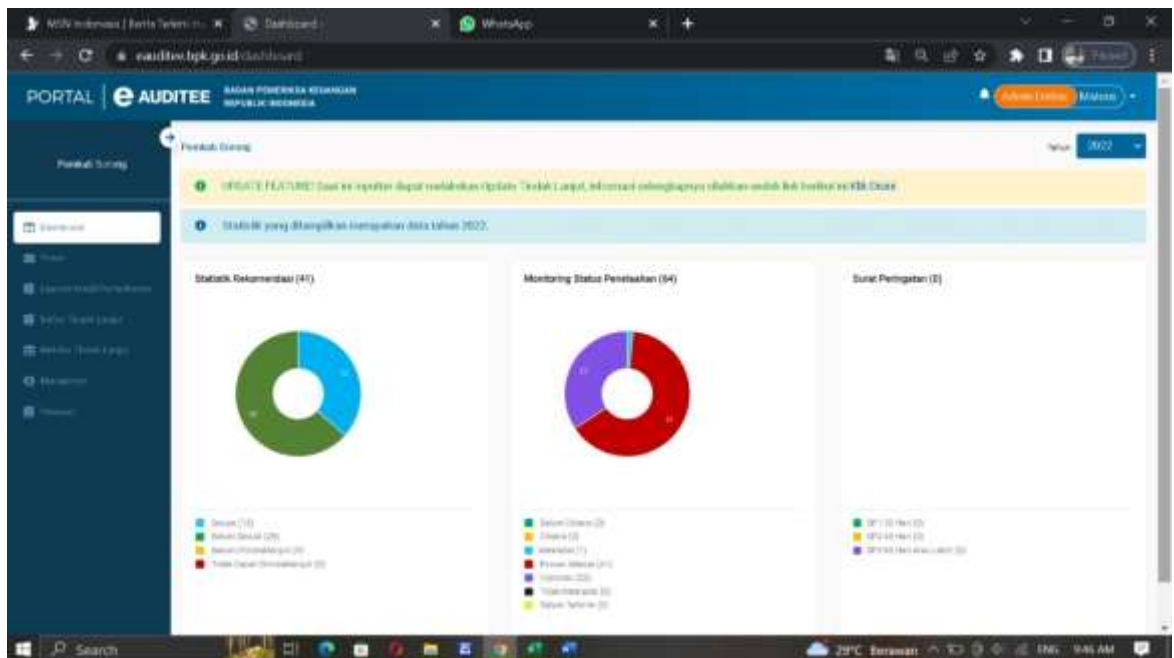
Metode pengukuran indikator kinerja persentase rekomendasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) selesai ditindaklanjuti yaitu tindak lanjut dengan status Sesuai Rekomendasi pada periode pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Semester II pada tahun berjalan.

BPK-RI melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK-RI selama periode pemeriksaan TA. 2005 s/d 2023. Status penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ada 4 tingkatan yaitu: Rekomendasi telah ditindaklanjuti, Rekomendasi dalam proses TL, Rekomendasi belum ditindaklanjuti, Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Inspektorat Kabupaten Sorong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada saat proses pemeriksaan mengkoordinasikan dan mendampingi SKPD, selanjutnya pada saat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi SKPD dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari tahun 2005 hingga TA.2023 menunjukkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas obyek pemeriksaan mengungkapkan 405 temuan pemeriksaan dan 945 rekomendasi. Pemerintah Kabupaten Sorong telah menindaklanjuti rekomendasi dengan status Sesuai Rekomendasi sebanyak 784 atau 82,96%. Dalam Proses tindaklanjut terdapat 135 rekomendasi atau 14,29%. Belum proses tindaklanjut 6 rekomendasi atau 0,63% dan tidak dapat Ditindaklanjuti 20 rekomendasi atau 2,12%.

Dari indikator diatas Penurunan temuan material BPK yang telah ditindaklanjuti tahun 2023 untuk TA.2022 adalah 82,96%. Penurunan persentase temuan yang dapat ditindaklanjuti tahun 2022 sebesar 83,78% lebih tinggi disbanding tahun 2023, namun Persentase TL oleh APIP menempati urutan pertama se-Papua Barat dan merupakan kerjasama yang baik pada seluruh OPD dilingkungan Kabupaten Sorong.



Gambar 3.2 Laporan tindak lanjut APIP Kab.Sorong pada BPK-RI melalui e-auditee.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Semakin baiknya Organisasi Perangkat Daerah dalam mengelola organisasi serta Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala dan berjenjang pada OPD serta kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan.
2. Tingginya komitmen dan kepedulian stakeholder untuk melaksanakan pelaporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel.
3. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk segera menyelesaikan seluruh temuan/kelemahan hasil temuan internal dan eksternal.

Hambatan/masalah :

1. Upaya yang kontinu diharapkan untuk mempertahankan tingkat penyelesaian temuan pada tahun berikutnya.
2. Koordinasi dan supervisi yang baik antar Organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sorong.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

1. Sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah dalam membantu visi misi Bupati Sorong;

2. Melaksanakan pendampingan/ layanan jasa konsultasi bagi OPD dalam bidang upaya pelaksanaan SAKIP serta penyelesaian temuan dan tindak lanjut;
3. APIP menjadi mitra yang baik, trusted advisor, dan early warning system bagi mitranya.

Indikator kinerja utama 1.3 yang dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut:

No	Indikator	Kondisi Awal RPD	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.3	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level	3 Level	100%	100%

Dari tabel diatas terdapat bahwa tingkat Kapabilitas APIP sebelumnya pada tahun 2022 berada pada level 3 dan periode tahun 2023 Realisasi adalah pada level 3 Penilaian tingkat kapabilitas APIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.

Penilaian kapabilitas APIP kabupaten Sorong melalui penilaian oleh Tim BPKP-Perwakilan Papua Barat yang menghasilkan **Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Kapabilitas APIP Daerah Tahun 2023** nomor : PE.09.03/S-822/D3/04/2023 tanggal 28 Desember 2023.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain :

1. Komitmen seluruh ASN Inspektorat Kabupaten Sorong untuk meningkatkan Profesionalitas dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
2. Komitmen Bupati Sorong, Para Pimpinan OPD dan seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai wujud dukungan kepada Kapabilitas APIP Kabupaten Sorong.

Hambatan/masalah :

1. Kompetensi dan Profesionalitas SDM belum cukup memadai sehingga dapat mempengaruhi kualitas pengawasan.
2. Pengalaman, Independensi, Objektivitas, Integritas, dan Motivasi yang dapat mempengaruhi profesionalitas dan kapabilitas APIP.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

1. Inspektorat kabupaten sorong dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas para APIP-nya dengan Diklat Substansi dan Non Subtansi dan pembentukan maupun penjurangan jabatan fungsional auditor maupun pengawas urusan pemerintah yang bersertifikasi;
2. Kompetensi dan Profesionalitas para APIP didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif dan dinamis serta menerapkan praktik kerja yang dan budaya kerja yang baik;
3. Dukungan Pimpinan dan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam alokasi pendanaan serta sinergi baik antar instansi Pemerintah Kabupaten Sorong yang erat.
4. Peningkatan jumlah SDM APIP serta kompetensi.

Sasaran tersebut diukur dengan 1 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Awal RPD	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.4	Persentase Penanganan Kasus Pengaduan	4 Kasus	6 Kasus	8 Kasus	4 Kasus	6 Kasus	75%	75%

Dari tabel diatas terdapat tahun 2022 indikator kinerja belum ditetapkan. Dan tahun 2023 ditargetkan untuk penanganan 8 kasus pengaduan oleh masyarakat/ ASN dengan realisasi 6 kasus yang dapat ditindaklanjuti.

Persentase penanganan kasus pengaduan ini melebihi capaian kinerja yang diperjanjikan sebesar 30% dengan realisasi 75% ditahun 2023.



Nomor : 700.1.2.1/1979/LK-TWIII/2023
Tanggal : 20 Oktober 2023

Gambar 3.3 Laporan Realisasi Pengaduan APIP Kabupaten Sorong

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain :

1. Tingkat kepercayaan masyarakat/ ASN terhadap APIP baik.
2. Komitmen Bupati Sorong, Para Pimpinan OPD dan seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai wujud dukungan kepada APIP Kabupaten Sorong.

Hambatan/masalah :

1. Pengalaman, Independensi, Objektivitas, Integritas, dan Motivasi yang dapat mempengaruhi profesionalitas dan kapabilitas APIP.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

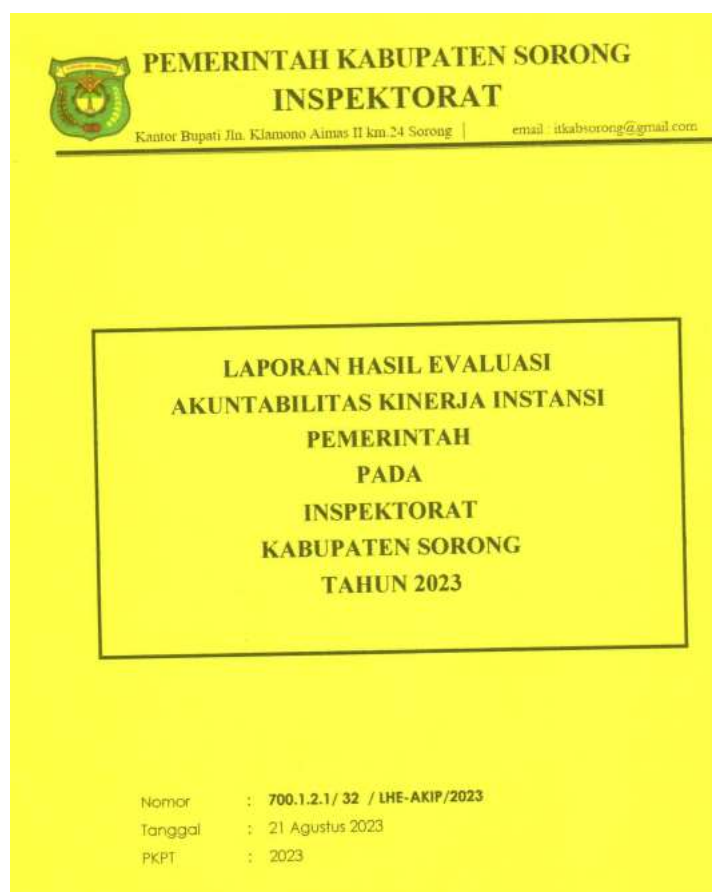
1. Inspektorat kabupaten sorong dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas para APIP-nya dengan Diklat Substansi dan Non Subtansi dan pembentukan maupun penjurangan jabatan fungsional auditor maupun pengawas urusan pemerintah yang bersertifikasi;
2. Peningkatan jumlah SDM APIP serta kompetensi.

Sasaran tersebut diukur dengan 1 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Awal RPD	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.5	Nilai AKIP	60 Poin	62 poin	63 poin	63,25 poin	63,40 poin	102.02%	100.63%

Peningkatan nilai SAKIP Inspektorat Kabupaten Sorong dari kategori B (nilai 63,25) pada tahun 2022 merupakan hasil kerjasama yang baik di internal APIP. Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan Capaian kinerja yang baik terukur dan terencana merupakan kunci keberhasilan peningkatan nilai SAKIP Inspektorat Kabupaten Sorong. Penilaian SAKIP Inspektorat Kabupaten Sorong oleh Tim Evaluator Sakip Tahun 2023 APIP Kabupaten Sorong sesuai dengan standar AAIP.

Tabel 3.4 Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sorong TA.2023



Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Tingginya kepedulian intern Inspektorat Kabupaten Sorong untuk melaksanakan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel.
2. Komitmen yang tinggi staf dan seluruh ASN Inspektorat dalam menunjang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hambatan/masalah :

1. Upaya yang kontinu diharapkan untuk mempertahankan nilai SAKIP yang optimal pada tahun berikutnya.
2. Koordinasi dan supervisi yang baik antar seluruh ASN Inspektorat kabupaten sorong.

Upaya meningkatkan keberhasilan penilaian SAKIP oleh eskternal, APIP selaku pengawas pemerintah didaerah bertekad dengan:

1. Koordinasi dan supervisi yang baik antar Organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sorong dalam upaya sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
2. Mendorong Organisasi perangkat daerah dalam pencapaian kinerja yang lebih baik;

Sasaran tersebut diukur dengan 1 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada tabel 3.6 sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Awal RPD	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2022	2023	2022	2023	2022	2023
2.1	Nilai Survey Kepuasan	60 Poin	-	65 Poin	-	78,39 Poin	-	120.60%

Tahun 2023 Inspektorat melaksanakan Survei Kepuasan Layanan bidang pengawasan. Survey yang dilaksanakan kepada para responden dan penerima layanan bidang pengawasan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh APIP antara lain : Audit, Reviu, Monitoring, Evaluasi, Asistensi dan Asurans Lainnya.



Gambar3.5 Laporan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain :

1. Tingkat kepercayaan masyarakat/ ASN terhadap APIP baik.
2. Komitmen Bupati Sorong, Para Pimpinan OPD dan seluruh ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong sebagai wujud dukungan kepada APIP Kabupaten Sorong.

Hambatan/masalah :

1. Pengalaman, Independensi, Objektivitas, Integritas, dan Motivasi yang dapat mempengaruhi profesionalitas dan kapabilitas APIP.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

1. Inspektorat kabupaten sorong dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas para APIP-nya .
2. Peningkatan jumlah SDM APIP serta kompetensi.

Akuntabilitas keuangan Tahun Anggaran 2023, telah disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong selaku Entitas Pelaporan. Berhubungan dengan capaian kinerja maka dalam laporan keuangan terdapat **Efisiensi** dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi capaian kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 belanja yang dialokasikan pada APBD adalah Rp.12,849,519,650,00 dengan realisasi sebesar Rp.11,335,411,386,00 (88,20%). Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp.14,723,875,482,00 dengan realisasi sebesar Rp.13,134,325,289,00 (89,20%) dan terjadi penurunan anggaran sebesar Rp.1,874,355,832,00 (-12,73%).

Tabel 3.6 Pagu Anggaran Tahun Sebelumnya dan Realisasi

KODE PROG / KEG.	U R A I A N	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Capaian %
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,519,648,048	4,375,793,915	4,375,519,650	4,186,815,889	95.68%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4,519,648,048	4,375,793,915	4,375,519,650	4,186,815,889	95.68%
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	103,000,000	103,000,000	35,000,000	35,000,000	33.98%
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	103,000,000	103,000,000	35,000,000	35,000,000	33.98%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,555,526,000	1,372,240,318	1,644,367,740	1,551,969,175	113.10%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	20,949,000	20,869,000	8,359,000	7,790,617	37.33%
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21,258,000	21,258,000	31,773,815	31,773,815	149.47%
3	Penyediaan Bahan Logistik kantor	159,039,000	159,039,000	135,670,925	130,688,425	82.17%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79,015,000	78,786,236	28,012,000	27,423,943	34.81%
5	Fasilitas kunjungan tamu	160,824,000	150,029,400	157,530,000	143,019,805	95.33%

KODE PROG ./ KEG.	U R A I A N	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Capaian %	
	6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,114,441,000	942,258,682	1,283,022,000	1,211,272,570	128.55%
4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	696,443,000	676,145,000	359,735,117	353,060,691	52.22%
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	696,443,000	676,145,000	359,735,117	353,060,691	52.22%
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	227,997,484	217,611,514	316,464,000	268,437,288	123.36%
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,600,000	2,500,000	7,600,000	2,850,000	114.00%
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54,997,484	50,711,514	114,224,000	74,547,288	147.00%
	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	110,400,000	110,400,000	194,640,000	191,040,000	173.04%
6		Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	54,000,000	54,000,000	531,241,943	466,144,089	863.23%
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	778,931,200	684,732,550	459,260,000	403,088,639	58.87%
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	329,315,200	257,874,150	6,500,000	5,455,000	2.12%
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	244,076,000	221,818,000	24,130,000	16,364,450	7.38%
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	205,540,000	205,040,400	41,351,943	41,236,000	20.11%
7		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2,245,872,000	1,920,582,860	1,954,554,500	1,835,806,795	95.59%
	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	227,750,000	209,700,000	215,750,000	190,725,000	90.95%
	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	227,750,000	215,750,000	215,750,000	212,200,000	98.35%
	3	Reviu Laporan Kinerja	227,750,000	215,750,000	215,750,000	213,800,000	99.10%
	4	Reviu Laporan Keuangan	543,000,000	508,800,000	431,500,000	424,400,000	83.41%
	5	Pengawasan Desa	525,300,000	465,500,000	449,600,000	427,455,000	91.83%
	6	Kerjasama Pengawasan Internal	307,494,000	162,441,800	195,498,500	178,206,342	109.70%
	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	186,828,000	142,641,060	230,706,000	189,020,453	132.51%
8		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1,811,526,000	1,641,444,304	1,162,496,000	1,022,100,000	62.27%
	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	168,656,000	136,574,304	110,956,000	-	0.00%
	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1,642,870,000	1,504,870,000	1,051,540,000	1,022,100,000	67.92%
9		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	1,139,087,750	925,235,103	1,595,324,700	1,245,897,459	134.66%
	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	210,836,000	196,997,772	187,150,000	186,750,000	94.80%
	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	928,251,750	728,237,331	1,408,174,700	1,059,147,459	145.44%
10		Pendampingan dan Asistensi	1,645,844,000	1,217,539,725	874,816,000	370,180,000	30.40%
	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	392,366,000	248,186,560	181,235,000	110,640,000	44.58%
	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	494,778,000	363,834,000	260,196,000	49,700,000	13.66%
	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	350,422,000	220,700,627	128,170,000	108,950,000	49.37%

KODE PROG ./ KEG.	U R A I A N		PAGU ANGGARAN 2022 (Rp)	REALISASI 2022 (Rp)	PAGU ANGGARAN 2023 (Rp)	REALISASI 2023 (Rp)	Capaian %
	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	408,278,000	384,818,538	305,215,000	100,890,000	26.22%
		T O T A L	14,723,875,482	13,134,325,289	12,849,519,650	11,335,411,386	86.30%

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategis dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020. Pengukuran kinerja LAKIP 2020 ini didasarkan atas objektivitas, kejujuran dan ketransparanan sebagaimana diamanahkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam LAKIP 2023 disajikan informasi tentang :

1. Pencapaian sasaran strategis organisasi.
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah disempurnakan.
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja baik dari segi pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan/implementasi.
4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan dan juga evaluasi tahun sebelumnya.

4.2 Saran

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja 2022 yaitu:

- 1) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2023 ini merupakan jawaban tertulis dari penyelenggaraan Good Governance Inspektorat Kabupaten Sorong.
- 2) Hasil Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong secara administrasi sebesar 97% serta capaian Program Kerja Pengawasan sebesar 101,70% dimana data ini adalah kegiatan dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.
- 3) Untuk melaksanakan kebijakan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan/ sasaran Inspektorat Kabupaten Sorong didukung dana sejumlah yaitu Belanja Operasi terdiri dari Rp.4.375.519.650,00 yaitu Belanja Pegawai, Rp.8.114.425.683,00 Belanja Barang dan Jasa. Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp.294.420.924,00 dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp.65.153.393,00 dengan total Pagu Rp.12.489.945.333,00.
- 4) Dari Analisa Keuangan tersebut Inspektorat Kabupaten Sorong telah mengacu pada efisiensi, dimana fisik dapat diselesaikan rata-rata 100% keuangan realisasi 88,22%.
- 5) Disamping dikemukakan gambaran kinerja juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan program kinerja dan kebijakan serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan yang diinginkan.

Sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam melaksanakan pembangunan, penyusunan anggaran dan penyusunan LAKIP yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi dan supervisi yang baik antar Organisasi perangkat daerah di kabupaten sorong dalam upaya sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan Mendorong Organisasi perangkat daerah dalam pencapaian kinerja yang lebih baik;
2. APIP menjadi mitra yang baik, trusted advisor, dan early warning system bagi mitranya.
3. Reviu dokumen keuangan, perencanaan, dsb secara berkala dan evaluasi capaian kinerja.
4. Inspektorat kabupaten sorong dalam meningkatkan profesionalitasnya melatih para APIP nya dengan Diklat pembentukan maupun

penjenjangan jabatan fungsional auditor maupun pengawas urusan pemerintah yang bersertifikasi,

Rencana Strategis

- OPD** **INSPEKTORAT**
- Tujuan** **1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Good Governance**
- 2. Meningkatnya kualitas layanan publik**
- Sasaran** **1. Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas**
- 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan**

Tujuan Pemda	Sasaran Pemda	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Data Capaian Awal	Target					Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target Nilai	Pengkampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target Nilai	Pengkampu
Terwujudnya pembangunan dan pelayanan publik berkelas dunia	Terwujudnya Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Good Governance	Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong	3		3	3	3	3	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	67	SEKRETA RIAT	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya kegiatan kebijakan pengawasan internal	Terlaksananya kegiatan bimtek, diklat, workshop dan pengembangan profesi lainnya	100	Sekretariat, Sub Bag Umum, Adm Dan Kepegawaian
				Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong	2.73		3	3	3	3	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Jumlah Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	370	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	13	Sekretariat, Sub Bag Perencanaan, Irban Wil
															Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Pemerintah Daerah	13	Sekretariat, Sub Bag Perencanaan, Irban Wil	
															Reviu Laporan Kinerja	Terwujudnya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	13	Sekretariat, Sub Bag Perencanaan, Irban Wil	
															Reviu Laporan Keuangan	Terwujudnya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	28	Sekretariat, Sub Bag Perencanaan, Irban Wil	
															Pengawasan Desa	Meningkatnya Pengawasan Desa	Jumlah Pengawasan Desa	80	Sekretariat, Sub Bag Perencanaan, Irban Wil	
															Kerjasama Pengawasan Internal	Terwujudnya Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal	2	Sekretariat, Sub Bag Perencanaan, Irban Wil	
															Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	6	Sekretariat, Sub Bag Evaluasi dan Pelaporan, Irban Wil	
					64.51		75	77.5	80	80.7	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi urusan pemerintah daerah yang berkualitas	Jumlah Pendampingan dan Asistensi urusan pemerintah daerah yang berkualitas	12	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	8	Sekretariat, Sub Bag Perencanaan, Irban Wil
															Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	2	Sekretariat, Sub Bag Perencanaan, Irban Wil	
															Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	2	Sekretariat, Sub Bag Perencanaan, Irban Wil	
															Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	2	Sekretariat, Sub Bag Perencanaan, Irban Wil	

Tujuan Pemda	Sasaran Pemda	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Data Capaian Awal	Target					Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target Nilai	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target Nilai	Pengampu	
				Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal dan Internal	82		0	75	77.5	80	80	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang di laksanakan	24	INSPEKTUR WILAYAH KHUSUS	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terwujudnya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	6	Sekretariat, Sub Bag Perencanaan, Irban khusus
																Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Probit Audit yang dapat diselesaikan	20	Sekretariat, Irban Wil, Irban Khusus	
																		Audit Dengan Tujuan Tertentu	10	Sekretariat, Irban Wil, Irban Khusus	
																		Jumlah Pemeriksaan Khusus	12	Sekretariat, Irban Wil	
																		Jumlah Audit Pelaksanaan PBJ OPD	160	Sekretariat, Irban Wil, Irban Khusus	
		2. Meningkatnya kualitas layanan publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Nilai Survey Kepuasan								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	SEKRETARIAT	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1	Sekretariat, Sub Bag Umum, Adm Dan Kepegawaian
												Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90	SEKRETARIAT	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan bagi ASN	100	Sekretariat, Sub Bag Umum, Adm Dan Kepegawaian
												Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	SEKRETARIAT	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	94	Sekretariat, Sub Bag Umum, Adm Dan Kepegawaian
												Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95	SEKRETARIAT	Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen listrik / penerangan untuk bangunan kantor yang di sediakan	100	Sekretariat, Sub Bag Umum, Adm Dan Kepegawaian
												Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	SEKRETARIAT	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga untuk kebersihan kantor	100	Sekretariat, Sub Bag Umum, Adm Dan Kepegawaian
												Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	SEKRETARIAT	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	100	Sekretariat, Sub Bag Umum, Adm Dan Kepegawaian
																Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	100	Sekretariat, Sub Bag Umum, Adm Dan Kepegawaian	
																Fasilitasi kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi kunjungan Tamu yang disediakan	100	Sekretariat, Sub Bag Umum, Adm Dan Kepegawaian	
																Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Sekretariat, Sub Bag Umum, Adm Dan Kepegawaian	
																Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin untuk kebutuhan kantor	100	Sekretariat, Sub Bag Umum, Adm Dan Kepegawaian	
																Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	100	Sekretariat, Sub Bag Umum, Adm Dan Kepegawaian	
																Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Sekretariat, Sub Bag Umum, Adm Dan Kepegawaian	
																Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Sekretariat, Sub Bag Umum, Adm Dan Kepegawaian	
																Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	6	Sekretariat, Sub Bag Umum, Adm Dan Kepegawaian	
																Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	100	Sekretariat, Sub Bag Umum, Adm Dan Kepegawaian	

Tujuan Pemda	Sasaran Pemda	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Data Capaian Awal	Target					Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target Nilai	Pengampu	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target Nilai	Pengampu
															Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Sekretariat, Sub Bag Umum, Adm Dan Kepegawaian	
															Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100	Sekretariat, Sub Bag Umum, Adm Dan Kepegawaian	
				Nilai SAKIP	60.2		59	61	60	62	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	8	SEKRETARIAT INSPEKTUR WILAYAH PEMBANTU	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	8	Sekretariat

**Penetapan Kinerja
INSPEKTORAT
2023**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	
Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong	3	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1,408,174,700.00	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,375,519,650.00	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35,000,000.00	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	8,359,000.00	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	31,773,815.00	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	135,670,925.00	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28,012,000.00
					Fasilitasi kunjungan Tamu	157,530,000.00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,283,022,000.00	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	359,735,117.00	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,600,000.00	
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	114,224,000.00	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194,640,000.00	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	459,260,000.00	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	6,500,000.00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,130,000.00					
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41,351,943.00					
Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong	3	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	215,750,000.00	
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	215,750,000.00	
				Reviu Laporan Kinerja	215,750,000.00	
				Reviu Laporan Keuangan	431,500,000.00	
				Pengawasan Desa	449,600,000.00	
				Kerjasama Pengawasan Internal	195,498,500.00	

Sasaran 1	Indikator Kinerja Utama 2	Target 3	Program 4	Kegiatan 5	Anggaran 6
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP lebih dari atau sama dengan B (%)	80.65	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	181,235,000.00
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	260,196,000.00
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	128,170,000.00
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan	305,215,000.00
	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Material BPK dari tahun sebelumnya	16.67	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	110,956,000.00
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1,051,540,000.00
	Persentase Temuan Material BPK yang telah di Tindak Lanjuti (%)	80	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	230,706,000.00
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP	62	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	187,150,000.00

**Rencana Kinerja Tahunan
INSPEKTORAT
2023**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Parameter Pengukuran	Target
1	2	3	4
Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong	Penilaian Level Maturitas SPIP Kabupaten Sorong oleh eksternal (BPKP-Perwakilan dan Tim Asessment Pusat)	3
	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong	Penilaian Level Maturitas SPIP Kabupaten Sorong oleh eksternal (BPKP-Perwakilan dan Tim Asessment Pusat)	3
	Persentase penanganan kasus pengaduan	$\frac{\text{Jumlah TLHP yg ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Temuan Material}} \times 100\%$	30%
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal dan Internal	$\frac{\text{Jumlah Laporan yg ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Laporan Pengaduan}} \times 100\%$	80.65%
	Nilai AKIP	Laporan Reviu SAKIP APIP Kabupaten Sorong	62 poin
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Nilai Survey Kepuasan	Nilai Penilaian Mandiri SKM	65 poin

**Pengukuran Kinerja
INSPEKTORAT
2023**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah yang Berkualitas	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong	3 Level	3 Level
	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong	3 Level	2 Level
	Persentase penanganan kasus pengaduan	30%	75.00%
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal dan Internal	80 %	82,96%
	Nilai AKIP	62 poin	63,04 poin
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Nilai Survey Kepuasan	65 Poin	78,39 poin

**Monitoring dan Evaluasi Anggaran
INSPEKTORAT
2023**

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran					%
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan							
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	187,150,000.00	0 %	0 %	47.43 %	46.01 %	186,750,000.00	99.79%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1,408,174,700.00	0 %	21.55 %	32.32 %	24.59 %	1,059,147,459.00	75.21%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4,375,519,650.00	28.41 %	26.48 %	22.03 %	22.03 %	4,186,815,889.00	95.69%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						-	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35,000,000.00	0 %	50%	50 %	0 %	35,000,000.00	100.00%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah						-	
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	8,359,000.00	0 %	49.81 %	49.81 %	0 %	7,790,617.00	93.20%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31,773,815.00	0 %	50 %	0 %	50 %	31,773,815.00	100.00%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135,670,925.00	50 %	0 %	50 %	0 %	130,688,425.00	96.33%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28,012,000.00	0 %	49.86 %	49.86 %	0 %	27,423,943.00	97.90%
	Fasilitasi kunjungan Tamu	157,530,000.00	0 %	31.09 %	31.09 %	31.11 %	143,019,805.00	90.79%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,283,022,000.00	0 %	26.84 %	44.73 %	12.73 %	1,211,272,570.00	94.41%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	359,735,117.00	0 %	76.81 %	3.84 %	16.44 %	353,060,691.00	98.14%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						-	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,600,000.00	0 %	0 %	29.07 %	0 %	2,850,000.00	37.50%
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	114,224,000.00	23.05 %	23.05 %	23.05 %	23.05 %	74,547,288.00	65.26%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	194,640,000.00	25 %	25 %	25 %	25 %	191,040,000.00	98.15%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	459,260,000.00	0 %	37.96 %	0 %	40.35 %	403,088,639.00	87.77%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	6,500,000.00	0 %	28.68 %	30.73 %	31.47 %	5,455,000.00	83.92%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24,130,000.00	0 %	25%	44%	99.76%	16,364,450.00	67.82%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	41,351,943.00	0 %	0 %	0 %	199.76%	41,236,000.00	99.72%
8	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						-	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	215,750,000.00	0 %	0 %	43.91 %	48.17 %	190,725,000.00	88.40%
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	215,750,000.00	0 %	43.91 %	0 %	50.82 %	212,200,000.00	98.35%
	Reviu Laporan Kinerja	215,750,000.00	0 %	0 %	43.91 %	50.82 %	213,800,000.00	99.10%
	Reviu Laporan Keuangan	431,500,000.00	0 %	0 %	36.83 %	56.87 %	424,400,000.00	98.35%
	Pengawasan Desa	449,600,000.00	0 %	0 %	57.11 %	31.51 %	427,455,000.00	95.07%

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran					%
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Kerjasama Pengawasan Internal	195,498,500.00	0 %	0 %	52.83 %	0 %	178,206,342.00	91.15%
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	230,706,000.00	0 %	0 %	40.14 %	36.2 %	189,020,453.00	81.93%
9	Pendampingan dan Asistensi						-	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	181,235,000.00	0 %	0 %	30.58 %	32.67 %	110,640,000.00	61.05%
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	260,196,000.00	0 %	0 %	30.32 %	43.22 %	49,700,000.00	19.10%
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	128,170,000.00	0 %	0 %	28.54 %	34.44 %	108,950,000.00	85.00%
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan	305,215,000.00	0 %	0 %	36.74 %	57.51 %	100,890,000.00	33.06%
10	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						-	
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	110,956,000.00	0 %	0 %	0 %	80.98 %	-	0.00%
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1,051,540,000.00	0 %	0 %	60.87 %	30.73 %	1,022,100,000.00	97.20%
Jumlah		12,849,519,650.00					11,335,411,386.00	88.22%

NO	Tujuan OPD	SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS BERORIENTASI HASIL (Ya/Tidak)	NO	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS BERKUALITAS (Ya/Tidak)	Target	NO	URAIAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	Target	NO	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	Target	NO	URAIAN KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	Target	TERKAIT	TIDAK TERKAIT	KET		
				2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Eksternal dan Internal	Ya	80%							7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terwujudnya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	6 Laporan					276,847,200		y		
														8	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Meningkatnya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan					145,654,200.00		y		
				3	Persentase penanganan kasus pengaduan	Ya	35%								9	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Proby Audit yang dapat diselesaikan	20 Laporan					1,418,482,000.00		y	
																	Jumlah Pemeriksaan Khusus	6 Laporan					-		y		
																	Jumlah Audit Pelaksanaan PBJ OPD	140 Laporan							y		
			Ya	4	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong (Level)	Ya	level 3		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Terwujudnya Penyelenggaraan Pembinaan, Pendampingan dan Asistensi Kebijakan Pemerintah Daerah yang Berkualitas	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Penyelenggaraan Kebijakan Teknis bidang pengawasan dan Fasilitasi Teknis	Fasilitasi Teknis Bidang Pengawasan danKebijakan Pengawasan	Level 3							3,384,072,640			
														1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya kegiatan kebijakan pengawasan internal	Terlaksananya kegiatan pengawasan internal Fungsional Auditor dan Pengawasan Berbasis Risiko	8 Laporan					249,283,800		y		
														2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Diklat, bimtek dan Workshop Fasilitasi Pengawasan	90 Kegiatan					1,809,809,640		y		
														3	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dan OPD yang diselesaikan	6 kegiatan					276,170,000		y		
														4	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	8 Laporan					119,436,000		y		
														5	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	32 Laporan					256,340,000		y		
					Survei Penilaian Integritas (SPI)	Ya	60	1						6	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Asistensi dan Monitoring evaluasi Penegakan Integritas dan Pembentukan Zona Integritas	4 Laporan					673,033,200		y		
2		Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Ya	1	Survey Kepuasan Masyarakat	Ya	65	1	Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota / Kabupaten	Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%												6,900,171,547			

INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

INSPEKTORAT KABUPATEN SORONG

TA 2023

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
1	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1. Tingkat Maturitas SPIP 2. Presentase tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal) 3. Presentase penanganan kasus pengaduan 4. Tingkat Kapabilitas APIP 5. Survei Penilaian Integritas (SPI)	1. Level 3 2. 80% 3. 30% 4. Level 3 5. 55	1. Level 2 2. 83.78% 3. 75% 4. Level 3 5. 59,79	1. Turun Level Maturitas SPIP akibat Adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK-RI dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong 2. Kabupaten Sorong. 2. Ketidapatuhan Pejabat Tinggi Pemerintah Kabupaten Sorong terhadap Komitmen dan Integritas memberantas tindak pidana Korupsi	1. Penerapan Manajemen Risiko, implementasi dan Rencana Tindak Pengendalian Risiko berjenjang diseluruh Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong. 2. Penerapan Budaya Kerja anti Korupsi, Berintegritas dan BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). 3. Melaksanakan pendampingan kepada OPD untuk menyusun risk Register, Rencana tindak pengendalian dan implemntasi Manajemen Risiko, 4. Pemberian Reward bagi OPD dan ASN teladan.	
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pengawasan Internal yang dilaksanakan	95%	102.46%			
				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan	10 Laporan	1. Pengawasan Kinerja / Audit kinerja terkendala pemetaan risk register dan proses bisnis yang dilaksanakan OPD belum dipahami 2. Profesionalitas APIP belum menunjang rekomendasi kinerja	1. Penguatan profesionalitas APIP melalui diklat 2. Pengaturan jadwal pemeriksaan kinerja melalui program strategis daerah	
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10 Laporan	10 Laporan	1. Objek audit terkendala objek pemeriksaan yang banyak 2. Profesionalitas APIP belum signifikan	1. Penguatan profesionalitas APIP melalui diklat 2. Asistensi dan pendampingan yang rutin dan intensif	
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	10 Laporan	1. Pelaksanaan Reviu laporan kinerja per triwulan belum dilaksanakan 2. Jadwal dan jumlah pemeriksa APIP belum mencukupi	1. Penguatan profesionalitas APIP melalui diklat 2. Penguatan peta proses bisnis dan penyalarsan program strategis daerah/OPD	
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	24 Laporan	26 Laporan	1. Objek audit terkendala objek pemeriksaan yang banyak 2. Profesionalitas APIP belum signifikan	1. Penguatan profesionalitas APIP melalui diklat 2. Penguatan SDM pengelola keuangan OPD	

UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	TARGET	REALISASI	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI MASALAH	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Perumusan Kebijakan Te	90%	107.64%			
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	1 Laporan	-	Penyelesaian TGR telah diselesaikan melalui Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Eksternal yang telah ditindak lanjuti		
				Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1. Jumlah Probity Audit yang dapat dilaksanakan 2. Jumlah Pemeriksaan Khusus 3. Jumlah Audit Pelaksanaan PBJ OPD 4. Jumlah Audit dengan Tujuan tertentu yang dilaksanakan	1. 20 Laporan 2. 6 Laporan 3. 140 Laporan 4. 4 Laporan	1. 17 Laporan 2. 4 Laporan 3. 161 Laporan 4. 2 Laporan	1. Pelaksanaan Penyerapan Probity Audit yang terkendala pada Tahap Pelaksanaan dan Serah Terima Pekerjaan yaitu penyelesaian Progress Pekerjaan yang terlambat 2. Audit tujuan tertentu yang dilaksanakan melalui tahapan pengujian substantif/ tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya untuk menguji batasan pemeriksaan yang belum dapat diungkap	1. Pelaksanaan Probity audit tahap pelaksanaan dan serah terima pekerjaan menjadi kewenangan penanggung jawab kegiatan OPD 2. Audit tujuan tertentu sebagai pembuktian dan penajaman permasalahan serta memberikan pertimbangan solutif bagi pimpinan	
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi bidang pengawasan yang dilaksanakan	95%	74%			
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	realisasi kegiatan sesuai target		
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis Fasilitasi bidang pengawasan	90 Kegiatan	67 Kegiatan	1. Penyerapan kegiatan yang dilaksanakan rendah 2. Kegiatan Diklat, Bimtek yang direncanakan tidak dapat tercapai disebabkan jadwal kegiatan yang padat	1. Kesiapan penyerapan anggaran 2. Mengatur jadwal diklat dan bimtek yang baik agar tidak saling bersinggungan	
				Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan dan Asistensi urusan pemerintah daerah yang berkualitas	90%	72.72%			
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Tertlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	8 Kegiatan	6 Kegiatan	1. Profesionalitas APIp dalam memberikan pendampingan/ asistensi urusan pemerintahan 2. Sinergitas OPD dalam memitigasi risiko dan pengendalian	1. Peningkatan SDM APIP 2. Sinergitas dan dukungan seluruh pimpinan OPD mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	

